

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dimulai dari kesulitan likuiditas sebagai indikasi keuangan yang paling ringan, sampai pernyataan kebangkrutan yang merupakan kondisi kesulitan keuangan yang paling berat. *Financial distress* dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal) (Cahyani dan Diantini, 2016). Sedangkan menurut Lienanda dalam penelitiannya (2019) *financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan terus bertambah buruk sehingga perusahaan tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada kreditor. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami *financial distress* ketika kinerja keuangan perusahaan makin memburuk, kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laba bersih dan nilai buku ekuitas yang menunjukkan angka negatif selama lebih dari satu tahun.

Baklouti et al., (2016) mengungkapkan bahwa *financial distress* dapat menyebabkan kebangkrutan, likuidasi atau perubahan signifikan dalam pengendalian yang dapat memotong aliran pendapatan yang diharapkan dari pengambil alihan. Secara umum orang dalam yang suka mengendalikan akan berkeinginan untuk terus mengambil alih kekayaan selama mungkin. Indonesia merupakan Negara yang masih bergantung dengan aliran dana dari investor. Secara otomatis investor menarik dananya dari Indonesia, hal ini mengakibatkan nilai tukar

mata uang Rupiah menurun. Situasi seperti ini menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun perusahaan asing mengalami *financial distress*.

Permasalahan keuangan perusahaan atau *financial distress* sudah menjadi momok bagi seluruh perusahaan, karena permasalahan *financial distress* dapat menyerang berbagai jenis perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Permasalahan keuangan pada perusahaan dapat menjadi bahan yang menarik untuk diteliti karena banyak perusahaan yang berusaha untuk menghindari kondisi ini. Selain itu kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan dapat memiliki pengaruh yang besar bagi pihak perusahaan yang mengalami kerugian, namun juga dapat berpengaruh terhadap pihak eksternal perusahaan yaitu *stakeholder* dan *shareholder* perusahaan yang juga akan terkena dampaknya.

Sesuai dengan surat keputusan direksi BEJ Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 poin III.3.1.1, bursa akan menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat apabila perusahaan tercatat mengalami kondisi atau peristiwa yang secara langsung berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha perusahaan tercatat (Ayuningtias, 2013). Dengan demikian salah satu yang menjadi penyebab perusahaan dihapus dari bursa adalah karena perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress*.

Hal tersebut terjadi pada PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) yang *delisting* pada tanggal 17 Juni 2019, seperti yang dikutip dari Market bisnis.com I Gede Nyoman Yetna Setia selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa untuk mengeluarkan perusahaan dari papan pencatatan (*delisting*) bursa mempertimbangkan aspek operasional dan legal, dan

pertimbangan lain saham tidak ditransaksikan selama 24 bulan. Berdasarkan laporan keuangan yang terakhir di rilis untuk periode 2018 SIAP mengalami kerugian senilai Rp 15,3 miliar sedangkan pendapatannya hanya sebesar Rp 1 miliar. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2017 yang mencatatkan kerugian senilai Rp 10,58 miliar. Bursa menilai SIAP tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana keinginan BEI dan sepanjang tahun 2018 masih menunjukkan kinerja keuangan yang buruk sehingga bursa melakukan *delisting* terhadap PT Sekawan Intipratama, Tbk. Lalu disusul oleh PT Borneo Lumbang Energi & Metal, Tbk (BORN) yang *delisting* pada tanggal 20 Januari 2020 yang sebelumnya saham perusahaan batu bara ini dihentikan sementara selama 5 tahun. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan kuartal III-2018 sejak April hingga September BORN tidak lagi membukukan tambahan pendapatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat yang menjadikan asset Negara sebagai jaminan mendapatkan dana dari Standard Chartered Bank (SCB). BEI juga sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah internal perusahaan, namun BORN tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Sehingga BEI memutuskan *deslisting* terhadap PT Borneo Lumbang Energi & Metal, Tbk (CNBCIndonesia.com).

Banyak sekali literatur yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *financial distress*. Kristanti (2019) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya *financial distress* terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal disebabkan atas ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangannya sehingga

perusahaan mengalami kerugian. Menurunnya kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan ketergantungan pada utang yang besar menandakan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi *financial distress* yang berdampak pada keberlangsungan usahanya. *Financial distress* yang dialami perusahaan dapat terjadi akibat *economic distress*, penurunan dalam industry perusahaan, tata kelola yang buruk yang dapat menyebabkan penyelewengan operasional perusahaan.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan elemen kunci dalam pengoptimalan kinerja perusahaan. Menurut Horne dan John (2017:9) hubungan antara para pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta pihak manajemen senior memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja hingga dapat terhindar dari kondisi-kondisi yang menyulitkan perusahaan. Kepatuhan yang lebih baik terhadap praktik tata kelola perusahaan dapat meningkatkan redistribusi sewa antara pemegang saham dan manajer, dan juga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, tata kelola perusahaan yang lemah pada akhirnya menghambat peluang investasi, perkembangan pasar modal, dan meningkatkan kemungkinan *financial distress* (Udin et al., 2017). Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit, dan proporsi komisaris independen karena variabel tersebut dianggap dapat mewakili tata kelola perusahaan dalam pengoptimalan kinerja perusahaan.

Udin et al., (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga struktur kepemilikan

institusional yang tersebar dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset perusahaan, dan diharapkan akan adanya pengawasan atas keputusan manajemen. Sementara kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan manajerial dan kepentingan investor sehingga mampu menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah-masalah keagenan antara manajemen dan investor (Sunarwijaya, 2017). Selain itu praktik pengungkapan yang lemah dan standar audit yang burukpun dapat memperburuk kualitas tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan (Udin et al., 2017). Menurut penelitian Fathonah (2016) Dewan komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan memberikan intuisi bahwa dewan memiliki kekuatan untuk menentukan keberhasilan perusahaan.

Kemudian dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa sektor sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Alasan lain dipilihnya perusahaan manufaktur dalam objek penelitian ini adalah karena saham perusahaan manufaktur lebih banyak diminati oleh investor dibandingkan perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu aset yang memiliki peran penting dalam pembangunan, dan selalu dituntut untuk semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya dimana pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam hal tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, tata kelola perusahaan terhadap *financial distress* dimana proksi dari tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit dan proporsi komisaris independ. Menurut Najmuddin dalam Mubarrok dkk (2020) definisi *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melakukan pengawasan serta melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan prinsip Islam yang didasarkan pada landasan ketauhidan kepada Allah SWT. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh Institusi atau Lembaga. Kepemilikan manajerial membuat manajemen memiliki peran sebagai pengelola dan pemilik harta. Islam mengakui kepemilikan harta asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang benar. Kepemilikan dalam Islam adalah syarat yang utama bagi seseorang untuk mengelola, memanfaatkan, serta membelanjakan harta. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَرَسُوْلُهُ عَمَلِكُمْ اللّٰهُ فَسَيَرَىٰ اَعْمَلُوْا وَقُلِ  
وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ الْاٰلِ وَاسْتَرْدُوْنَ ۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ  
تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ

Artinya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen serta komite audit dilakukan untuk memantau serta mengoreksi yang salah dan memberikan suatu kebijakan agar tercapainya tujuan perusahaan. Dalam Islam pengawasan diperlukan

agar dalam pelaksanaan pekerjaan terhindar dari segala penyimpangan-penyimpangan dan sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk membuat rencana apa yang akan dilakukannya dikemudian hari. Allah berfirman dalam QS As-Sajadah ayat 24:

نُونُ يُوْقَ بِأَيْتِنَا وَكَانُوا ۖ صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَيْمَةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا

Artinya:

“Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami”.

Secara menyeluruh proksi penelitian dari tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, ukuran komite audit, dan proporsi komisaris independen terhadap *financial distress* belum memenuhi syariat Islam secara menyeluruh dari setiap variabel sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *financial distress* pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Financial Distress* Serta Ditinjau Dari Sudut Pandang Islami (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan menggunakan variabel tata kelola perusahaan dan *financial distress*, peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh dari adanya variabel tersebut, sehingga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit, dan proporsi komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit, dan proporsi komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ditinjau dari sudut pandang Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit, dan proporsi komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.



2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi komite audit, dan proporsi komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ditinjau dari sudut pandang Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dalam memprediksi *financial distress* dalam suatu perusahaan terutama perusahaan manufaktur dalam menambah informasi dan referensi tentang *financial distress* bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menjadi masukan untuk perusahaan yang mengalami *financial distress* mengenai faktor yang dapat berpengaruh untuk mengatasi kondisi *financial distress*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pemakai laporan keuangan atau investor dalam menganalisis kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau dalam kondisi *financial distress*.
- c. Diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi lembaga pemerintah dalam mengantisipasi dan menerapkan kebijakan mengenai kondisi *financial distress*.